

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (3) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp	28.297.361.482.869,82	
b. Belanja Daerah	Rp	<u>26.423.599.893.297,00</u>	
Surplus			Rp 1.873.761.589.572,82
c. Pembiayaan Daerah			
- Penerimaan Daerah	Rp	4.926.078.266.154,38	
- Pengeluaran Daerah	Rp	<u>329.221.365.219,00</u>	
Pembiayaan Netto			Rp <u>4.596.856.900.935,38</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Jumlah		Rp 6.470.618.490.508,20

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.451.668.422.338,82 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 26.845.693.060.531,00
 - b. Realisasi Rp 28.297.361.482.869,82

Selisih lebih Rp 1.451.668.422.338,82

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 4.498.761.826.005,38 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 30.922.361.719.302,38 |
| b. Realisasi | <u>Rp 26.423.599.893.297,00</u> |
| Selisih kurang | (Rp 4.498.761.826.005,38) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 5.950.430.248.344,20 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp 4.076.668.658.771,38) |
| b. Realisasi | <u>Rp 1.873.761.589.572,82</u> |
| Selisih lebih | Rp 5.950.430.248.344,20 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp14.882.248.025,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 4.911.196.018.129,38 |
| b. Realisasi | <u>Rp 4.926.078.266.154,38</u> |
| Selisih lebih | Rp 14.882.248.025,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 505.305.994.139,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 834.527.359.358,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 329.221.365.219,00</u> |
| Selisih kurang | (Rp505.305.994.139,00) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 520.188.242.164,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp 4.076.668.658.771,38 |
| b. Realisasi | <u>Rp 4.596.856.900.935,38</u> |
| Selisih lebih | Rp 520.188.242.164,00 |
- (7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2011 terdiri dari :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Saldo Kas di BUD per 31 Desember 2011 | Rp 6.415.285.572.576,20 |
| b. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa UUDP tahun 2011) | <u>Rp 55.332.917.932,00</u> |
| SILPA Tahun 2011 | Rp 6.470.618.490.508,20 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp 375.745.320.267.463,20
b. Jumlah kewajiban	Rp 715.436.707.127,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 375.029.883.560.336,20

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2011	Rp	5.149.410.691.628,38
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	9.182.116.631.356,82
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp	(7.308.355.041.784,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(330.299.748.214,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(88.701.937.952,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2011	Rp	6.604.170.595.035,20

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya

- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah
 Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Lampiran V : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana
- f. Lampiran VI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi)

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 31 Agustus 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 3 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
 NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 TAHUN 2012 NOMOR 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	
4	PENDAPATAN	26,845,693,060,531.00	28,297,361,482,869.82	1,451,668,422,338.82	105.41
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16,280,133,657,370.00	17,825,987,294,430.82	1,545,853,637,060.82	109.50
4.1.1	Pajak Daerah	13,995,000,000,000.00	15,221,249,152,889.48	1,258,249,152,889.48	109.00
4.1.2	Retribusi Daerah	458,248,032,850.00	609,349,051,004.00	153,101,019,324.00	133.56
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	243,677,823,025.00	278,789,787,934.40	35,112,139,909.40	114.41
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	1,615,207,998,885.00	1,718,599,322,802.98	101,391,326,137.98	108.28
4.2	DANA PERIMBANGAN	8,658,411,159,801.00	9,149,708,963,289.00	491,297,803,488.00	105.67
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8,448,501,717,801.00	8,939,799,521,289.00	491,297,803,488.00	105.62
4.2.2	Dana Alokasi Umum	209,909,442,000.00	209,909,442,000.00	0.00	100.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,907,148,243,360.00	1,321,665,225,150.00	(585,483,018,210.00)	69.30
4.3.1	Pendapatan Hibah	594,000,000,000.00	8,410,777,790.00	(595,589,222,210.00)	1.42
4.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,313,148,243,360.00	1,313,254,447,360.00	106,204,000.00	100.01
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BELANJA DAERAH	30,922,361,719,302.38	26,423,599,893,297.00	(4,498,761,826,005.38)	85.45
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10,244,198,936,446.38	9,627,347,326,824.00	(616,851,609,622.38)	93.98
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	9,242,941,691,827.38	8,757,472,025,899.00	(495,469,665,729.38)	94.75
5.1.2	BELANJA BUNGA	4,353,823,000.00	4,353,524,981.00	(303,019.00)	99.99
5.1.3	BELANJA SUBSIDI	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4	BELANJA HIBAH	892,574,018,819.00	925,595,937,217.00	(56,978,029,602.00)	93.54
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	58,289,400,000.00	38,587,206,589.00	(19,682,194,442.00)	66.22
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1,350,000,000.00	1,338,593,170.00	(11,416,830.00)	99.15

Nomor Urut	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	54,710,000,000.00	0.00	(54,710,000,000.00)	0.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	20,678,162,782,856.00	16,796,252,566,473.00	(3,881,910,216,383.00)	81.23
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,315,034,905,180.88	1,138,083,013,279.00	(176,946,891,901.88)	86.54
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,655,899,614,840.26	8,341,831,218,443.00	(1,314,068,396,197.26)	86.39
5.2.3	BELANJA MODAL	9,707,228,283,035.06	7,316,333,334,751.00	(2,390,894,928,284.06)	75.37
	Surplus / (Defisit)	(4,076,668,658,771.38)	1,873,761,589,572.82	5,950,430,248,344.20	0.00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	4,076,668,658,771.38	4,596,856,900,935.38	520,188,242,164.00	112.76
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,911,196,018,129.38	4,926,078,266,154.38	14,882,248,025.00	100.30
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4,911,196,018,129.38	4,911,196,018,129.38	0.00	100.00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	14,882,248,025.00	14,882,248,025.00	0.00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	834,527,359,358.00	329,221,365,219.00	(505,305,994,139.00)	39.45
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	54,558,325,705.00	54,558,325,705.00	0.00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	694,000,000,000.00	136,780,777,790.00	(557,219,222,210.00)	19.71
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	140,527,359,358.00	133,559,739,102.00	(8,967,620,256.00)	95.04
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	4,324,522,622.00	4,324,522,622.00	0.00
	Pembiayaan Neto	4,076,668,658,771.38	4,596,856,900,935.38	520,188,242,164.00	112.76
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0.00	6,470,618,490,508.20	6,470,618,490,508.20	0.00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2011**

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan		Belanja	
				Setelah Perubahan Realisasi	Bertambah/(Berkurang) (Rp / %)	Setelah Perubahan Realisasi	Bertambah/(Berkurang) (Rp / %)
1	2	3	4	5	6		
1			URUSAN WAJIB				
1	01		PENDIDIKAN	1,177,335,041.00	(285,938,842.00)	8,293,729,076,679.00	(416,724,816,959.00)
				891,396,199.00	75.71	7,877,004,259,720.00	94.98
1	01	1.02.001	DINAS KESEHATAN			0.00	0.00
						0.00	0.00
1	01	001	DINAS PENDIDIKAN	1,177,335,041.00	(285,938,842.00)	8,293,629,076,679.00	(416,724,565,159.00)
				891,396,199.00	75.71	7,876,904,511,520.00	94.98
			5.1.1 BELANJA PEGAWAI			4,982,845,821,531.00	(95,893,804,770.00)
						4,886,952,016,761.00	98.08
			5.2.1 BELANJA PEGAWAI			135,102,307,406.00	(12,268,765,362.00)
						122,833,542,044.00	90.92
			5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA			1,490,241,250,485.00	(79,997,330,511.00)
						1,410,243,919,974.00	94.63
			5.2.3 BELANJA MODAL			1,685,439,697,257.00	(228,564,664,516.00)
						1,456,875,032,741.00	86.44
1	01	1.20.349	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu			100,000,000.00	(251,800.00)
						99,748,200.00	99.75
			5.2.1 BELANJA PEGAWAI			19,500,000.00	0.00
						19,500,000.00	100.00
			5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA			80,500,000.00	(251,800.00)
						80,248,200.00	99.69
1	02		KESEHATAN	535,523,472,830.00	(12,397,585,166.00)	2,698,984,021,400.00	(243,217,690,009.00)
				523,125,887,664.00	97.68	2,455,766,331,391.00	90.99
1	02	001	DINAS KESEHATAN	96,002,210,165.00	(8,741,932,617.00)	1,683,358,384,091.00	(182,950,785,421.00)
				87,260,277,548.00	90.89	1,500,407,598,670.00	89.13
			5.1.1 BELANJA PEGAWAI			463,060,744,837.00	(23,172,949,290.00)
						439,887,795,547.00	95.00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pembiayaan (Setelah Penambahan / Realisasi / Bertambah (Berkurang))			SILPA TAB	
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan Netto		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	20					
	380	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN				
		PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	4,911,196,018,129.38	834,527,359,358.00	4,076,668,658,771.38	0.00
			4,926,078,266,154.38	329,221,365,219.00	4,596,856,900,935.38	6,470,618,490,508.20
			14,882,248,025.00	(505,305,994,139.00)	520,188,242,164.00	6,470,618,490,508.20

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, D. ORGANISASI : 1.20.002 SEKRETARIAT DPRD / 0.01.01.00.0000.000										
KODE REKENING		URAIAN			Angg. Stlh Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah / (Berkurang)	%	DASAR HUKUM	
1	2			3	4	5 = 4 - 3	6	7		
JUMLAH PENDAPATAN					0.00	0.00	0.00	0.00		
1.20	002			5						
BELANJA DAERAH										
1.20	002			5	1	52,848,822,894.00	49,474,561,816.00	(3,374,261,078.00)	93.62	
BELANJA TIDAK LANGSUNG										
1.20	002			5	1	52,848,822,894.00	49,474,561,816.00	(3,374,261,078.00)	93.62	
BELANJA PEGAWAI										
1.20	002			5	2	188,599,667,030.00	120,292,035,270.00	(68,307,631,760.00)	63.78	
BELANJA LANGSUNG										
1.20	002	01				116,924,582,050.00	68,345,897,540.00	(48,578,684,510.00)	58.45	
Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1.20	002	01	001			600,000,000.00	288,481,750.00	(311,518,250.00)	48.08	
Aktifitas Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta										
1.20	002	01		5	2	1	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00
BELANJA PEGAWAI										
1.20	002	01		5	2	2	597,500,000.00	285,981,750.00	(311,518,250.00)	47.86
BELANJA BARANG DAN JASA										
1.20	002	01	002			1,000,000,000.00	508,713,250.00	(491,286,750.00)	50.87	
Roadshow Demen (Dewan Mendengar dan Menjawab)										
1.20	002	01		5	2	1	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
BELANJA PEGAWAI										
1.20	002	01		5	2	2	996,000,000.00	504,713,250.00	(491,286,750.00)	50.67
BELANJA BARANG DAN JASA										
1.20	002	01	003			0.00	0.00	0.00	0.00	
Duta Legislatif Muda DKI Jakarta										
1.20	002	01		5	2	1	0.00	0.00	0.00	0.00
BELANJA PEGAWAI										
1.20	002	01		5	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
BELANJA BARANG DAN JASA										
1.20	002	01	004			0.00	0.00	0.00	0.00	
Pegembangan Management Filling System Perpustakaan Sekretarian DPRD Prov DKI										
1.20	002	01		5	2	1	0.00	0.00	0.00	0.00
BELANJA PEGAWAI										
1.20	002	01		5	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
BELANJA BARANG DAN JASA										
1.20	002	01	006			5,357,245,000.00	2,066,730,000.00	(3,290,515,000.00)	38.58	
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan										
1.20	002	01		5	2	2	5,357,245,000.00	2,066,730,000.00	(3,290,515,000.00)	38.58
BELANJA BARANG DAN JASA										
1.20	002	01	007			31,070,000.00	25,680,000.00	(5,390,000.00)	82.65	
Peningkatan kualitas kehumasan dan keprotokolan										

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, D.
 ORGANISASI : 1.20.380 JABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH / 7.00.0' .0000.000

KODE REKENING	URAIAN	Angg. Stlh Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah / (Berkurang)	%	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	834,527,359,358.00	329,221,365,219.00	505,305,994,139.00	100.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(520,188,242,164.00)	4,596,856,900,935.38	4,076,668,658,771.38	(0.30)	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Angg. Setelah Perubahan / Realisasi / Bertambah (Berkurang) / %				
						Jenis Belanja			Jumlah 6 = 3 + 4 + 5	
					Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
1					2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	
1					URUSAN WAJIB	1,306,093,539,597.11 1,128,959,830,835.00 (177,133,708,762.11) 86.44	9,249,338,951,077.83 7,956,154,165,803.00 (1,293,184,785,274.83) 86.02	9,601,571,951,571.06 7,183,806,078,987.00 (2,417,765,872,584.06) 74.82	20,157,004,442,246.00 16,268,920,075,625.00 (3,888,084,366,621.00) 80.71	
1	01				PENDIDIKAN	135,121,807,406.00 122,853,042,044.00 (12,268,765,362.00) 90.92	1,490,321,750,485.00 1,410,324,168,174.00 (320,831,012,189.00) 94.63	1,685,439,697,257.00 1,456,875,032,741.00 (228,564,664,516.00) 86.44	3,310,883,255,148.00 2,990,052,242,959.00 (320,831,012,189.00) 90.31	
1	01	001			DINAS PENDIDIKAN	135,102,307,406.00 122,833,542,044.00 (12,268,765,362.00) 90.92	1,490,241,250,485.00 1,410,243,919,974.00 (79,997,330,511.00) 94.63	1,685,439,697,257.00 1,456,875,032,741.00 (228,564,664,516.00) 86.44	3,310,783,255,148.00 2,989,952,494,759.00 (320,830,760,389.00) 90.31	
1	01	001	10		Program pelaksanaan SPM lain urusan Pendidikan	53,076,000.00 52,669,000.00 (407,000.00) 99.23	495,924,000.00 472,368,920.00 (23,555,080.00) 95.25	0.00 0.00 0.00 0.00	549,000,000.00 525,037,920.00 (23,962,080.00) 95.64	
1	01	001	10	001	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)	15,576,000.00 15,169,000.00 (407,000.00) 97.39	233,424,000.00 219,126,420.00 (14,297,580.00) 93.87	0.00 0.00 0.00 0.00	249,000,000.00 234,295,420.00 (14,704,580.00) 94.09	
1	01	001	10	002	Pembinaan ketahanan sekolah	37,500,000.00 37,500,000.00 0.00 100.00	262,500,000.00 253,242,500.00 (9,257,500.00) 96.47	0.00 0.00 0.00 0.00	300,000,000.00 290,742,500.00 (9,257,500.00) 96.91	
1	01	002	10		Program pelaksanaan SPM lain urusan Pendidikan	5,856,000.00 5,856,000.00 0.00	11,664,000.00 3,664,000.00 (8,000,000.00)	0.00 0.00 0.00	17,520,000.00 9,520,000.00 (8,000,000.00)	

Kode	Ura. Jurusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Angg. Setelah Perubahan / Realisasi / Bertambah (Berkurang) / %			
		Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
		0.00	0.00	0.00	0.00
2	08				
	KETRANSMIGRASIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		1,329,508,405,086.68	9,923,402,551,833.26	10,053,738,023,643.06	21,306,648,980,563.00
		1,147,217,565,523.00	8,562,812,295,748.00	7,568,810,955,638.00	17,278,840,816,909.00
		(182,290,839,563.68)	(1,360,590,256,085.26)	(2,484,927,068,005.06)	(4,027,808,163,654.00)
		86.29	86.29	75.28	81.10

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2011**

Kode			Uraian	Angg. Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		
01			PELAYANAN UMUM	7,402,273,575,644.38	6,197,508,431,753.00	(1,204,765,143,891.38)	83.72
01	1	20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	6,774,395,905,490.38	5,686,948,041,462.00	(1,087,447,864,028.38)	83.95
01	1	21	KETAHANAN PANGAN	18,578,476,834.00	13,977,587,005.00	(4,600,889,829.00)	75.24
01	1	19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	497,178,000.00	496,944,900.00	(233,100.00)	99.95
01	1	23	STATISTIK	4,300,000,000.00	4,053,914,050.00	(246,085,950.00)	94.28
01	2	06	PERDAGANGAN	46,098,931,490.00	42,691,823,018.00	(3,407,108,472.00)	92.61
01	1	03	PEKERJAAN UMUM	390,000,000.00	224,764,500.00	(165,235,500.00)	57.63
01	1	05	PENATAAN RUANG	3,446,015,000.00	1,885,928,869.00	(1,560,086,131.00)	54.73
01	1	25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	176,977,549,269.00	147,507,258,222.00	(29,470,291,047.00)	83.35
01	1	06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	113,312,029,620.00	71,384,148,185.00	(41,927,881,435.00)	63.00
01	1	08	LINGKUNGAN HIDUP	83,440,637,358.00	74,362,343,027.00	(9,078,294,331.00)	89.12
01	1	24	KEARSIPAN	30,641,511,803.00	22,715,051,137.00	(7,926,460,666.00)	74.13
01	1	02	KESEHATAN	635,000,000.00	632,076,100.00	(2,923,900.00)	99.54
01	2	05	KELAUTAN DAN PERIKANAN	385,000,000.00	343,934,500.00	(41,065,500.00)	89.33
01	1	09	PERTANAHAN	2,000,000,000.00	724,061,418.00	(1,275,938,582.00)	36.20

Kode			Uraian	Angg. Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
1			2	3	4	5 = 4 - 3	6
11	1	13	SOSIAL	353,001,081,311.00	331,318,910,050.00	(21,682,171,261.00)	93.86
11	1	12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	13,218,471,481.00	12,452,514,069.00	(765,957,412.00)	94.21
11	1	10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	134,743,146,115.00	105,614,331,227.00	(29,128,814,888.00)	78.38
JUMLAH				30,922,361,719,302.38	26,423,599,893,297.00	(4,498,761,826,005.38)	85.45

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
PER 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Investasi	Tahun Pertama Investasi	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Saldo Awal Per 1 Januari 2011	Penambahan 1 Jan s.d 31 Des 2011	Pengurangan 1 Jan s.d 31 Des 2011	Saldo Akhir Per 31 Desember 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah						
		1992	PDAM Jaya	0,00	-	-	-
		1985	PD Dharma Jaya	41.986.097.819,00	-	4.561.085.544,00	37.425.012.275,00
		1982	PD Pembangunan Sarana Jaya	85.444.003.305,00	4.517.881.581,00	-	89.961.884.886,00
		1982	PD Pasar Jaya	455.699.334.613,00	-	68.451.203.031,00	387.248.131.582,00
		1991	PD PAL Jaya	113.998.401.828,00	6.544.532.946,00	-	120.542.934.774,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah			697.127.837.565,00	11.062.414.527,00	73.012.288.575,00	635.177.963.517,00
2	Penyertaan Modal Pada Patungan						
		1961	PT Pembangunan Jaya	609.828.914.716,00	-	-	609.828.914.716,00
		1972	PT Food Station Tjipinang	10.852.457.711,00	1.142.740.302,00	-	11.995.198.013,00
		1973	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	87.136.122.729,00	17.437.820.398,00	-	104.573.943.127,00
		1970	PT Delta Djakarta Tbk	151.926.661.382,00	-	6.340.374.819,00	145.586.286.563,00
		1991	PT Pembangunan Jaya Ancol	752.480.163.616,00	68.775.143.897,00	-	821.255.307.513,00
		1973	PT Determinan Indah	2.175.120.000,00	-	2.175.120.000,00	-
		1971	PT Ratax Armada	1.719.125.000,00	-	1.264.081.723,00	455.043.277,00
		2002	PT Kawasan Berikat Nusantara	209.692.695.000,00	-	-	209.692.695.000,00
		1996	PT Alasaka Industrindo Tbk	4.885.650.000,00	-	-	4.885.650.000,00
		1971	PT Cermani Toka	27.059.360.000,00	-	-	27.059.360.000,00
		1971	PT Pakuan International	1.345.900.000,00	-	-	1.345.900.000,00
		1992	PT Grahasahari Suryajaya	3.951.000.000,00	-	-	3.951.000.000,00
		1993	PT Jaya Nur Sukses	6.750.000.000,00	-	6.750.000.000,00	-
		1989	PT Asuransi Bangun Askrida	8.680.000.000,00	-	-	8.680.000.000,00
		1997	PT Jakarta Propertindo	563.971.058.930,00	119.221.692.248,00	-	683.192.751.178,00
		1993	PT Bank DKI Jakarta	1.215.834.769.146,00	31.020.066.054,00	-	1.246.854.835.200,00
		2004	PT Jakarta International Expo	39.375.000.000,00	-	-	39.375.000.000,00
		2004	PT Jakarta Tourisindo	470.715.365.281,00	-	3.879.755.350,00	466.835.609.931,00
		2004	PT Rumah Sakit Haji	51.157.222.000,00	-	-	51.157.222.000,00
		2008	PT Mass Rapid Transit Jakarta	97.470.871.942,00	17.784.547.572,00	-	115.255.419.514,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Patungan			4.317.007.457.453,00	255.382.010.471,00	20.409.331.892,00	4.551.980.136.032,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah			5.014.135.295.018,00	266.444.424.998,00	93.421.620.467,00	5.187.158.099.549,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

**DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Saldo per 31 Desember 2010 (Audited BPK)	324.425.352.369.781,00	8.875.908.865.229,00	16.274.161.176.936,00	20.757.902.864.604,00	1.053.027.313.008,00	1.050.709.756.741,00	372.437.062.346.299,00
Mutasi Penambahan							
Belanja Modal	835.380.811.026,00	2.256.864.596.055,00	1.145.125.657.150,00	819.760.207.709,00	291.574.115.927,00	1.876.156.763.370,00	7.224.862.151.237,00
Kapitalisasi Non Belanja Modal	260.430.000,00	87.313.914.469,00	259.639.842.447,00	62.831.170.206,00	2.446.491.373,00	73.567.902.458,00	486.059.750.953,00
Hibah dan Tukar Menukar	43.132.960.000,00	11.061.215.123,00	6.794.564.054,00	-	-	-	60.988.739.177,00
Pengadaan Dari Dana Operasional BLUD	-	5.917.739.745,00	254.439.101,00	-	2.900.000,00	-	6.175.078.846,00
KDP Sudah Selesai Dilaksanakan	597.483.140,00	2.990.915.405,00	317.267.557.632,00	356.926.197.891,00	-	-	677.782.154.068,00
Hutang Pihak Ke-3	-	97.212.500,00	-	1.967.516.792,00	-	6.137.532.446,00	8.202.261.738,00
Koreksi Kurang Catat/Salah Catat	893.431.589.640,00	73.700.798.404,00	86.746.010.892,00	9.249.390.272,00	56.134.117,00	269.833.450.692,00	1.333.017.374.017,00
Koreksi Penambahan	51.505.818.600,00	178.739.637.380,00	105.402.255.788,00	82.175.773.040,00	47.130.933.644,00	-	464.954.418.452,00
Jumlah Mutasi Penambahan	1.824.309.092.406,00	2.616.686.029.081,00	1.921.230.327.064,00	1.332.910.255.910,00	341.210.575.061,00	2.225.695.648.966,00	10.262.041.928.488,00
Mutasi Pengurangan							
Penghapusan	69.315.750.000,00	6.941.102.784,00	125.406.552.477,00	19.888.000,00	77.605.000,00	737.468.350,00	202.498.366.611,00
Reklas ke Persediaan/Inventaris	-	121.507.403.755,00	5.223.465.513,00	12.655.004.500,00	12.467.668.395,00	-	151.853.542.163,00
Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ke-3	-	8.796.816.599,00	365.743.361,00	118.366.030,00	3.019.589.923,00	-	12.300.515.913,00
Reklas ke Aset Rusak Berat	-	30.154.649.754,00	4.512.249.500,00	200.000.000,00	-	-	34.866.899.254,00
KDP Sudah Selesai Dilaksanakan	-	-	-	-	-	677.782.154.068,00	677.782.154.068,00
Koreksi Pencatatan Ganda/Salah Catat	143.297.462.000,00	19.306.518.638,00	264.476.662.776,00	-	47.520.000,00	-	427.128.163.414,00
Koreksi Pengurangan	45.766.533.225.133,00	13.882.607.322,00	86.807.234.859,00	202.330.362.005,00	51.883.217.929,00	-	46.121.436.647.248,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	45.979.146.437.133,00	200.589.098.852,00	486.791.908.486,00	215.323.620.535,00	67.495.601.247,00	678.519.622.418,00	47.627.866.288.671,00
Saldo per 31 Desember 2011 (Audited BPK)	280.270.515.025.054,00	11.292.005.795.458,00	17.708.599.595.514,00	21.875.489.499.979,00	1.326.742.286.822,00	2.597.885.783.289,00	335.071.237.986.116,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

**DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Saldo Awal Per 1 Januari 2011	Penambahan 1 Jan s.d 31 Des 2011	Pengurangan 1 Jan s.d 31 Des 2011	Saldo Akhir Per 31 Desember 2011
1	2	3	4	5	6
1	Tagihan Penjualan Angsuran	5.472.077.262,00	32.418.160.993,00	-	37.890.238.255,00
	- Penjualan Angsuran Rumah Susun	5.472.077.262,00	32.418.160.993,00	-	37.890.238.255,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.203.396.892.190,00	221.884.198.000,00	264.767.316.565,00	3.160.513.773.625,00
	- Bangun Guna Serah (BOT)	362.515.103.572,00		23.500.000.000,00	339.015.103.572,00
	- Bangun Serah Guna (BTO)	1.008.667.348.780,00	-	-	1.008.667.348.780,00
	- Kerjasama Operasi (KSO)	46.470.678.000,00	221.884.198.000,00	-	268.354.876.000,00
	- Aset Kerjasama Pihak Ketiga	1.785.743.761.838,00	-	241.267.316.565,00	1.544.476.445.273,00
3	Aset Tidak berwujud	8.783.701.766,00	4.408.411.463,00	-	13.192.113.229,00
4	Aset di BP THR Lokasari	12.458.773.028,00	113.061.603,00	-	12.571.834.631,00
5	Aset Lain-lain	17.967.323.157.057,00	4.334.554.686.799,00	174.261.970.229,00	22.127.615.873.627,00
	- Aset Tetap Rusak Berat	273.669.949.055,00	13.170.813.496,00	-	286.840.762.551,00
	- Aset Tetap Belum Validasi	15.754.944.225,00	-	15.754.944.225,00	0,00
	- Aset Lain-lain di BLUD	3.548.392.265,00	-	-	3.548.392.265,00
	- Kas Dikonsinyasikan	151.963.511.062,00	-	41.224.170.000,00	110.739.341.062,00
	- Aset Fasos Fasum	17.404.994.973.394,00	4.305.628.929.078,00	-	21.710.623.902.472,00
	- Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	108.531.052,00	-	-	108.531.052,00
	- Aset yang akan diserahkan ke instansi lain	117.282.856.004,00	-	117.282.856.004,00	-
	- Aset Lembaga di Biro Dikmental	-	15.754.944.225,00	-	15.754.944.225,00
	Jumlah	21.197.434.601.303,00	4.593.378.518.858,00	439.029.286.794,00	25.351.783.833.367,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
PER 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	Realisasi					Sudah selesai dikerjakan Per 31 Desember 2011	Jumlah Akumulasi s.d 31 Desember 2011	Keterangan
			2007	2008	2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4+5+6+7+8-9)	12
									-	
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM		-	-	1.410.287.606	415.843.482.203	873.979.672.521	(356.168.189.981)	935.065.252.349	
	DINAS PEKERJAAN UMUM		-	-	1.285.559.606	403.693.947.148	869.390.867.471	(344.018.654.926)	930.351.719.299	
1		Pembangunan Jembatan FO Bandengan			732.253.803	69.437.895.659		(70.169.949.462)	-	
2		Pembangunan Jembatan Tubagus Angke			553.305.803	49.707.015.325		(50.260.321.128)	-	
3		Pembangunan Jalan layang non tol Antasari-Blok M				81.766.110	518.868.417.123		518.950.183.233	
4		Pembangunan Jalan layang non Kp Melayu-Tanah Abang				49.059.666	231.002.853.153		231.051.912.819	
5		Pembangunan On/Off Ramp Timur JLNT Kp Melayu-Tanah Abang Tahap 1					33.312.740		33.312.740	
6		Pembangunan Jembatan Muara angke				2.042.684.786		(2.042.684.786)	-	
7		Pembangunan Pump Gate Kapuk Poglar				20.850.556.539		(20.850.556.539)	-	
8		Penyelesaian Sistem Pompa Air cideng				17.425.063.907		(17.425.063.907)	(0)	
9		Pembangunan Polder Kampung Bandan				9.240.260.375	9.775.589.491		19.015.849.866	
10		Peningkatan kapasitas Long Storage Kali Siantar dan Kali Cideng				12.200.298.544		(12.200.298.544)	-	
11		Pembangunan Pompa Tomang				23.518.757.518		(23.518.757.518)	(0)	
12		Pembangunan Pompa Duri				20.896.084.018		(20.896.084.018)	-	
13		Pembangunan pompa gate pada saluran penghubung				25.961.154.039		(25.961.154.039)	(0)	
14		Penanggulangan sampah di kali pesing				30.430.404.222		(30.430.404.222)	(0)	
15		Pembuatan dan Pembersihan saluran di Jl. Thamrin wahid Hasyim,Sunda dan sekitarnya				36.328.320.937		(36.328.320.937)	-	
16		Perluasan dan pembangunan turap Situ Babakan				17.901.724.336		(17.901.724.336)	-	
17		Perbaikan dan pemeliharaan Saringan sampah				15.698.494.850		(15.698.494.850)	-	
18		Pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen Marunda-Rorotan)				14.069.575.092	20.223.424.132		34.292.999.224	
19		Pemb. Jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen rorotan-cakung timur)				10.206.563.541			10.206.563.541	
20		Pelebaran jalan kembangan raya				4.680.415.081	7.129.857.460		11.810.272.541	
21		Pemb. Jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen cakung timur-Raya Bekasi)				9.060.329.517	24.012.102.950		33.072.432.467	
22		Pemb. jalan tembus Kelapa Gading/Boulevard timur terminal Pulo Gadung				13.572.882.446	8.293.587.299		21.866.469.745	
23		Program penataan dan penertiban sepadan sungai, situ, saluran dan waduk kegiatan invent dan PT. waduk Bintaro Rt07/05 kelurahan Bintaro Jaksel				31.043.500		(31.043.500)	-	
24		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				8.679.000		(8.679.000)	-	
25		Program pemb. Jalan dan jembatan keg pembebasan tanah untuk pelebaran jalan pada koridor busway				50.000.000		(50.000.000)	-	
26		Program pembangunan Jalan dan jembatan keg pembebasan lahan untuk sejajar tol W2 (pondok pinang-kebon jeruk)				75.000.000		(75.000.000)	-	batal dilaksanakan
27		Program pembangunan jalan dan jembatan keg inventarisasi dan pembebasan tanah FO tubagus angke				160.088.140		(160.088.140)	-	
28		Program pembangunan jalan dan jembatan keg inventarisasi dan PT on/off ramp jalann layang non tol antasari-blok M				10.030.000		(10.030.000)	-	
29		Rumah Pempa di muara Kali Banglio/Muara Daru					3.152.834.811		3.152.834.811	

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan/Pekerjaan	Realisasi					Sudah selesai dikerjakan Per 31 Desember 2011	Jumlah Akumulasi s.d 31 Desember 2011	Keterangan
			2007	2008	2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4+5+6+7+8-9)	12
17		BLUD RS Budi Asih	-	-	369.084.350	-	1.065.607.500	-	1.434.691.850	
1	5.2.2.21.02.02	Pengembangan master plan RSUD Budi Asih	-	-	369.084.350				369.084.350	
2		Pengembangan master plan RSUD Budi Asih	-	-			1.065.607.500		1.065.607.500	
18		BLUD RS PASAR REBO	-	-	459.287.000	892.262.075	35.743.375.355	-	37.094.924.430	
1	5.2.2.21.02.02	Pengembangan master plan RSUD Pasar Rebo	-	-	459.287.000				459.287.000	
2		DED Gedung baru				892.262.075			892.262.075	
3		Pembangunan Fisik Gedung dan Konsultan					35.671.819.560		35.671.819.560	
4		Belanja Konsultasi					61.628.500		61.628.500	
5		Pembangunan fisik gedung pelayanan kegawatdaruratan terpadu					9.927.295			
19		BLUD RS KOJA	-	-	-	18.720.979.500	-	(18.720.979.500)	-	
		Gedung Rumah Sakit				18.720.979.500		(18.720.979.500)	-	
20		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BLKD JAKARTA UTARA	-	-	-	113.690.000	-	(113.690.000)	-	
1		Pembangunan Gudang dan Musholla				113.690.000		(113.690.000)	-	
24		BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	-	-	17.199.343.740	1.470.320.288	(17.027.078.740)	1.642.585.288	
1		Master Plan				86.625.000,00			86.625.000	
2		Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan BPAD					998.246.863,00		998.246.863	
		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKPUS	-	-	-	-	94.927.425	-	94.927.425	
1		X-1 Rehabilitasi Total Gedung Kantor					94.927.425,00		94.927.425	
		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKUT	-	-	-	85.640.000	-	-	85.640.000	
1		X-1 Rehabilitasi Total Gedung Perpustakaan Gereja Tugu				85.640.000,00			85.640.000	
		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKBAR	-	-	-	17.027.078.740	-	(17.027.078.740)	-	
1		Pemb. Gedung Perpustakaan Permanen				17.027.078.740,00		(17.027.078.740)	-	
		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKSEL	-	-	-	-	88.742.500	-	88.742.500	
		X-1 Pembangunan Gedung Kantor					88.742.500,00		88.742.500	
		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKTIM	-	-	-	-	288.403.500	-	288.403.500	
1		X-1 Rehab Gedung KPAK Jakarta Timur					288.403.500,00		288.403.500	
25		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	-	-	-	-	9.456.185.450	-	9.456.185.450	
1		Pembangunan Kantor Camat Senen					9.456.185.450,00		9.456.185.450	
		Jumlah	12.326.883.810	113.136.428.615	132.586.375.551	792.660.068.765	2.225.695.648.966	(678.519.622.418)	2.597.885.783.289	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran I.10 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 2 Tahun 2012
 Tanggal : 31 Agustus 2012

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Maksud Mengadakan Dana Cadangan	Tahun Mulai Mengadakan Dana Cadangan	Saldo Awal Per 1 Januari 2011	Penambahan 1 Jan s.d 31 Des 2011	Pengurangan 1 Jan s.d 31 Des 2011	Saldo Akhir Per 31 Desember 2011	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang tidak dapat ditanggulangi dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2000	738.879.058.817,00	52.136.205.178,00	-	791.015.263.995,00	Sesuai Perda No.10/1999 tentang Dana Cadangan Daerah. DCD awal disediakan pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
2	Membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran						Tambahan DCD selama Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp52.136.205.178,00.
	Jumlah		738.879.058.817,00	52.136.205.178,00	-	791.015.263.995,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 FAUZI BOWO

Lampiran I.11 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 2 Tahun 2012
 Tanggal : 31 Agustus 2012

DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
							Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (RP)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OECD IP-346 SLA 614	22 Desember 1989	JPY 1.388.000.000,00	20 tahun	9,25	Proyek GEIS	2.002.670.024,00	141.250.819,00	0,00	0,00
2	OECD IP-365 SLA 650	14 Desember 1990	JPY 6.446.000.000,00	20 tahun	9,25	Proyek Jaringan Air Minum	1.056.021.760,00	74.075.525,00	0,00	0,00
3	OECD IP-414 SLA 876	04 Nopember 1993	JPY 3.860.000.000,00	20 tahun	11,75	Waste Man Improv, Project	8.169.288.822,00	4.138.198.637,00	28.592.510.877,00	6.828.561.025,00
JUMLAH							11.227.980.606,00	4.353.524.981,00	28.592.510.877,00	6.828.561.025,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 FAUZI BOWO

NERACA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2011 (AUDITED)	31 DESEMBER 2010 (AUDITED)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.1.4.1.1	6.604.170.595.035,20	5.149.410.691.628,38
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.4.1.2	63.322.260.315,00	47.195.181.722,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.4.1.3	471.150.214.490,00	359.983.830.423,00
Piutang Pajak	5.1.4.1.4	318.360.404.837,00	270.137.069.957,00
Piutang Retribusi	5.1.4.1.5	52.164.511.797,00	113.747.162.263,00
Piutang Dana Bagi Hasil	5.1.4.1.6	-	63.460.296.760,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	5.1.4.1.7	6.010.554.773,00	14.553.317.787,00
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	5.1.4.1.8	17.433.576.963,00	12.660.935.779,00
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	5.1.4.1.9	647.865.846,00	1.077.567.683,00
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex BPPN	5.1.4.1.10	82.806.023.066,00	86.831.790.551,00
Piutang Penjualan Saham	5.1.4.1.11	47.871.975,00	6.005.000.000,00
Piutang Lainnya	5.1.4.1.12	360.736.484.563,00	391.446.311.001,00
Persediaan	5.1.4.1.13	530.477.129.539,00	359.914.727.571,00
Jumlah Aset Lancar		8.507.327.493.199,20	6.876.423.883.125,38
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.1.4.2.1	836.797.591.237,00	832.473.068.615,00
Investasi Permanen	5.1.4.2.2	5.187.158.099.549,00	5.014.135.295.018,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		6.023.955.690.786,00	5.846.608.363.633,00
Aset tetap	5.1.4.3		
Tanah		280.270.515.025.054,00	324.425.352.369.781,00
Peralatan dan Mesin		11.292.005.795.458,00	8.875.908.865.229,00
Gedung dan Bangunan		17.708.599.595.514,00	16.274.161.176.936,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		21.875.489.499.979,00	20.757.902.864.604,00
Aset Tetap Lainnya		1.326.742.286.822,00	1.053.027.313.008,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		2.597.885.783.289,00	1.050.709.756.741,00
Jumlah Aset tetap		335.071.237.986.116,00	372.437.062.346.299,00
Dana Cadangan	5.1.4.4	791.015.263.995,00	738.879.058.817,00
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.1.4.5.1	37.890.238.255,00	5.472.077.262,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.1.4.5.2	3.160.513.773.625,00	3.203.396.892.190,00
Aset tidak berwujud	5.1.4.5.3	13.192.113.229,00	8.783.701.766,00
Aset di BP THR Lokasari	5.1.4.5.4	12.571.834.631,00	12.458.773.028,00
Aset lain-lain	5.1.4.5.5	22.127.615.873.627,00	17.967.323.157.057,00
Jumlah Aset Lainnya		25.351.783.833.367,00	21.197.434.601.303,00
JUMLAH ASET		375.745.320.267.463,20	407.096.408.253.177,38

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2011 (AUDITED)	31 DESEMBER 2010 (AUDITED)
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.1.5.1.1 - 2	190.512.449.471,00	278.701.130.299,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga	5.1.5.1.3	1.287.854.344,00	1.771.253.235,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok	5.1.5.1.4	8.169.288.822,00	11.227.980.601,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.5.1.5	13.412.097.456,00	9.559.245.462,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.5.1.6 - 11	481.631.794.979,00	259.585.125.006,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		695.013.485.072,00	560.844.734.603,00
Kewajiban Jangka Panjang	5.1.5.2		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		20.423.222.055,00	28.592.510.876,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		20.423.222.055,00	28.592.510.876,00
JUMLAH KEWAJIBAN		715.436.707.127,00	589.437.245.479,00
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	5.1.6.1		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		6.470.618.490.508,20	4.911.196.018.129,38
Pendapatan yang Ditangguhkan		468.833.033.411,00	359.369.573.319,00
Cadangan Piutang		838.207.293.820,00	959.919.451.781,00
Cadangan Persediaan		530.477.129.539,00	359.914.727.571,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		(495.821.939.151,00)	(274.820.622.278,00)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		7.812.314.008.127,20	6.315.579.148.522,38
Ekuitas Dana Investasi	5.1.6.2		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		6.023.955.690.786,00	5.846.608.363.633,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		335.071.237.986.116,00	372.437.062.346.299,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		25.351.783.833.367,00	21.197.434.601.303,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		(20.423.222.055,00)	(28.592.510.876,00)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		366.426.554.288.214,00	399.452.512.800.359,00
Ekuitas Dana Cadangan	5.1.6.3		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		791.015.263.995,00	738.879.058.817,00
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		791.015.263.995,00	738.879.058.817,00
JUMLAH EKUITAS DANA		375.029.883.560.336,20	406.506.971.007.698,38
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		375.745.320.267.463,20	407.096.408.253.177,38

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 2 Tahun 2012

Tanggal : 31 Agustus 2012

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2011 Audited (Rp)	2010 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Pajak Daerah	5.1.7.1.1.a	15.221.249.152.689,46	10.751.745.151.388,10
Retribusi daerah	5.1.7.1.1.b	609.349.051.004,00	439.210.908.273,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.7.1.1.c	278.789.767.934,40	223.005.615.402,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.1.7.1.1.d	1.708.621.029.835,96	1.463.709.317.004,95
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.7.1.1.e	8.747.636.169.886,00	9.398.613.243.892,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.7.1.1.f	192.163.351.403,00	138.995.814.195,00
Dana Alokasi Umum	5.1.7.1.1.g	209.909.442.000,00	0,00
Dana Penyesuaian	5.1.7.1.1.h	1.313.254.447.360,00	515.460.978.000,00
Pendapatan Hibah	5.1.7.1.1.i	8.410.777.790,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		28.289.383.189.902,82	22.930.741.028.155,00
Arus Kas Keluar :			
Belanja Pegawai	5.1.7.1.2.a	9.895.560.039.177,00	8.537.848.251.424,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.7.1.2.b	8.341.831.218.443,00	7.312.154.901.037,00
Belanja Bunga	5.1.7.1.2.c	4.353.524.981,00	7.421.194.046,00
Belanja Hibah	5.1.7.1.2.d	825.595.987.217,00	423.468.762.400,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.7.1.2.e	38.587.205.558,00	27.517.450.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.7.1.2.f	1.338.583.170,00	1.338.583.230,00
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		19.107.266.558.546,00	16.309.749.142.137,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		9.182.116.631.356,82	6.620.991.886.018,05
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
Arus Kas Masuk :			
Pendapatan Pelepasan Hak atas Tanah	5.1.7.2.1	3.425.839.360,00	8.924.942.201,00
Pendapatan Brandgang		0,00	71.609.372,00
Pendapatan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor		96.050.000,00	1.635.010.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		2.544.090.000,00	1.305.128.500,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		1.877.313.607,00	2.284.499.900,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		35.000.000,00	100.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		7.978.292.967,00	14.321.189.973,00
Arus Kas Keluar :			
Belanja Tanah	5.1.7.2.2	836.875.205.034,00	789.628.585.455,00
Belanja Peralatan dan Mesin		2.230.836.678.548,00	1.814.555.325.146,00
Belanja Gedung dan Bangunan		2.178.504.183.603,00	1.272.971.144.201,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.661.022.855.743,00	1.162.459.219.136,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		409.094.411.823,00	203.532.422.860,00
Jumlah Arus Kas Keluar		7.316.333.334.751,00	5.243.146.696.798,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>		(7.308.355.041.784,00)	(5.228.825.506.825,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
Arus Kas Masuk :			
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.7.3.1.a	14.882.248.025,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2010)	5.1.7.3.1.b	39.372.286.912,00	63.092.347.377,00
Jumlah Arus Kas Masuk		54.254.534.937,00	63.092.347.377,00
Arus Kas Keluar :			
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.7.3.2.a	54.556.325.705,00	50.037.643.933,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.7.3.2.b	136.780.777.790,00	80.912.965.000,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	5.1.7.3.2.c	11.227.980.606,00	24.683.619.364,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	5.1.7.3.2.d	120.985.101.023,00	24.295.092.565,00
Pembayaran Utang Kepada Pegawai		1.346.657.473,00	3.477.962.500,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.7.3.2.e	4.324.522.622,00	127.000.000.000,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2011)	5.1.7.3.2.f	55.332.917.932,00	39.372.286.912,00
Jumlah Arus Kas Keluar		384.554.283.151,00	349.779.570.274,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		(330.299.748.214,00)	(286.687.222.897,00)

URAIAN	Catatan	2011 Audited (Rp)	2010 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Uang Jaminan	5.1.7.4.1	995.484.806,00	1.105.302.300,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran		323.165.720,00	383.959.483,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.1.7.4.3	1.759.665.947.862,00	1.551.588.252.577,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.760.984.598.388,00	1.553.077.514.360,00
Arus Kas Keluar :			
Pengeluaran Uang Jaminan		0,00	130.595.575,00
Pengeluaran Transfer ke Rekening Kas Daerah		323.165.720,00	957.919.569,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.1.7.4.3	1.849.363.370.620,00	1.485.317.810.824,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.849.686.536.340,00	1.486.406.325.968,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</i>		(88.701.937.952,00)	66.671.188.392,00
Kenaikan (Penurunan) Kas	4.1.7.5	1.454.759.903.406,82	1.172.150.344.688,05
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		5.149.410.691.628,38	3.977.260.346.940,33
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah		6.604.170.595.035,20	5.149.410.691.628,38
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		63.322.260.315,00	47.195.181.722,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		471.150.214.490,00	359.983.830.423,00
Saldo Akhir Kas		7.138.643.069.840,20	5.556.589.703.773,38

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	v
BAB I Pendahuluan	I - 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	I - 6
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	II - 1
2.1 Ekonomi Makro.....	II - 1
2.2 Kebijakan Keuangan.....	II - 13
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	II - 17
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	III - 1
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	III - 1
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.....	III - 5
BAB IV Kebijakan Akuntansi	IV - 1
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	IV - 4
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	IV - 5
4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.....	IV - 5
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	IV - 21
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	V - 1
5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan	V - 1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA
PER 31 DESEMBER 2011

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Hak Minoritas	Modal Disetor	Tambahannya Modal Disetor	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah		
																	Cost Method	Equity Method	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (18 X 17)	20 (18 + 19)
1	Bidang Perbankan																		
1.	PT Bank DKI	Audited 2011	18.994.158.000	511.230.000	-	19.505.388.000	16.653.187.000	1.603.348.000	18.256.535.000	-	631.159.000	1.000	146.000	617.547.000	1.248.853.000	99,84%	-	1.246.854.835	1.246.854.835
	Sub Total 1		18.994.158.000	511.230.000	-	19.505.388.000	16.653.187.000	1.603.348.000	18.256.535.000	-	631.159.000	1.000	146.000	617.547.000	1.248.853.000		-	1.246.854.835	1.246.854.835
2	Bidang Asuransi																		
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	Unaudited 2011	304.587.754	600.557.663	-	905.145.417	562.303.298	-	562.303.298	-	159.860.000	34.290.000	144.082.728	755.503	338.963.232	4,47%	8.680.000	-	8.680.000
	Sub Total 2		304.587.754	600.557.663	-	905.145.417	562.303.298	-	562.303.298	-	159.860.000	34.290.000	144.082.728	755.503	338.963.232		8.680.000	-	8.680.000
3	Bidang Konstruksi																		
1.	PT Jakarta Propertindo	Unaudited 2011	897.631.470	262.522.244	24.044.600	1.184.198.314	294.442.865	206.015.706	500.458.571	-	429.995.757	-	100.000.000	153.743.986	683.739.743	99,92%	-	683.192.751	683.192.751
2.	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2010	27.564.000	483.260.000	2.736.000	513.560.000	70.263.000	7.835.000	78.098.000	-	3.117.000	131.653.737	83.393.941	1.343.559.329	1.571.724.007	38,80%	-	609.828.915	609.828.915
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	Unaudited 2011	117.702.847	142.984.253	-	260.687.100	102.249.556	67.581.133	169.830.689	894.526	200.000.000	-	(133.997.229)	23.959.114	89.061.885	100,00%	-	89.961.885	89.961.885
	Sub Total 3		1.042.898.317	888.766.498	26.780.600	1.958.445.414	466.955.421	281.431.839	748.387.260	894.526	633.112.757	131.653.737	59.396.712	1.521.262.429	2.345.425.635		-	1.382.983.551	1.382.983.551
4	Bidang Jasa Lainnya																		
1.	PT Jakarta International Expo	Audited/2007	19.597.963	1.317.961.793	-	1.337.559.756	43.977.931	1.003.234.399	1.047.212.329	-	300.000.000	-	-	(9.652.573)	290.347.427	13,14%	39.375.000	-	39.375.000
2.	PDAM Jaya	Audited 2011	416.053.946	203.731.082	-	619.785.028	959.340.648	593.220.088	1.552.560.736	-	288.364.100	-	42.861.685	(1.264.001.494)	(932.775.708)	100,00%	-	-	-
3.	PD PAL Jaya	Audited 2011	53.898.257	79.621.483	-	133.519.740	6.695.303	12.976.808	19.672.111	-	94.752.402	-	12.536.696	13.253.835	120.542.935	100,00%	-	120.542.935	120.542.935
4.	PD Pasar Jaya	Audited 2011	420.712.630	1.098.547.359	64.536.360	2.182.796.349	168.331.520	1.628.216.897	1.796.546.217	-	15.203.308	318.356.193	-	53.688.630	387.248.132	100,00%	-	387.248.132	387.248.132
	Sub Total 4		910.262.796	3.299.861.717	64.536.360	4.274.660.873	1.177.931.801	3.231.366.488	4.409.298.088	-	698.319.810	318.356.193	55.398.383	(1.206.711.601)	(134.637.219)		39.375.000	507.791.066	547.166.066
5	Bidang Perdagangan																		
1.	PT Food Station Tjipinang	Unaudited 2011	10.370.162	41.273.774	-	51.643.936	12.388.649	23.191.007	35.579.656	-	300.000	-	-	15.764.280	16.064.280	74,67%	-	11.995.198	11.995.198
2.	PD Dharma Jaya	Unaudited 2011	29.733.547	28.099.165	14.253.310	72.086.021	20.757.374	13.903.635	34.661.009	-	31.377.432	-	9.341.974	(3.294.394)	37.425.012	100,00%	-	37.425.012	37.425.012
	Sub Total 5		40.103.709	69.372.938	14.253.310	123.729.957	33.146.022	37.094.642	70.240.665	-	31.677.432	-	9.341.974	12.469.886	53.489.292		-	49.420.210	49.420.210
6	Bidang Pariwisata																		
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Audited 2011	578.657.177	1.158.374.730	-	1.737.031.907	426.262.591	131.544.066	557.806.657	38.592.878	400.000.000	36.709.233	-	703.923.139	1.140.632.372	72,00%	-	821.255.308	821.255.308
2.	PT Jakarta Tourisindo	Unaudited 2011	48.923.800	410.354.537	96.938.398	556.216.736	25.094.115	61.185.425	86.279.540	-	455.511.000	-	(8.931.935)	23.358.131	469.937.195	99,34%	-	468.835.610	468.835.610
3.	PT Grahasahari Suryajaya	Audited/2009	14.527.495	359.294.759	-	373.818.254	89.631.056	56.275.707	155.908.763	-	48.870.000	592.242.796	-	(423.201.305)	217.911.491	8,08%	3.951.000	-	3.951.000
4.	PT Pakuan International	Audited 2010	820.579	37.187.456	3.149.640	41.157.675	374.485	1.923.279	2.297.764	-	50.000.000	236.600	2.039.534	(13.416.224)	38.859.910	2,09%	1.345.900	-	1.345.900
	Sub Total 6		642.925.051	1.965.211.482	100.088.038	2.708.224.571	551.362.247	250.928.477	802.290.724	38.592.878	954.381.000	629.168.629	(6.892.401)	290.663.740	1.867.340.968		5.296.900	1.288.090.917	1.293.387.817
7	Bidang Kawasan Industri																		
1.	PT Jakarta Industrial Estate Puloagung	Unaudited 2011	156.331.456	81.250.064	17.580.618	255.172.137	44.877.274	1.146.976	46.024.251	-	80.000.000	-	3.122	129.144.764	209.147.886	50,00%	-	104.573.943	104.573.943
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2010	182.026.700	480.537.430	63.637.980	726.202.110	72.839.710	29.672.490	102.512.200	-	383.345.000	111.967.700	104.893.290	42.863.940	623.689.930	26,85%	209.692.695	-	209.692.695
	Sub Total 7		338.358.156	561.787.494	81.228.598	981.374.247	117.716.984	30.819.466	148.536.451	-	443.945.000	111.967.700	104.896.412	172.028.704	632.837.816		209.692.695	104.573.943	314.266.638
8	Bidang Angkutan Darat																		
1.	PT Ratar Amada	Audited 2011	1.328.863	3.498.780	-	4.827.643	3.170.109	32.190	3.202.589	-	5.500.000	-	-	(3.874.845)	1.625.155	28,00%	-	455.043	455.043
2.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2011	101.889.007	21.805.472	-	123.694.479	6.336.272	1.732.786	8.069.058	-	155.000.000	6.780.778	-	(46.155.357)	115.625.421	90,68%	-	115.255.420	115.255.420
	Sub Total 8		103.217.970	25.304.252	-	128.522.222	9.506.670	1.764.976	11.271.647	-	160.500.000	6.780.778	-	(50.030.202)	117.250.575		-	115.710.463	115.710.463
9	Bidang Aneka Industri																		
1.	PT Delta Jakarta Tbk	Audited 2011	577.644.530	118.522.140	-	696.166.676	96.129.303	27.101.946	123.231.249	18.321.002	16.013.181	19.015.656	-	519.585.588	554.614.425	26,25%	-	145.586.287	145.586.287
2.	PT Alakasa Industrindo Tbk	Audited 2011	246.208.535	12.275.213	-	258.483.778	195.541.102	14.382.242	209.923.344	-	73.503.957	200.000	(583.014)	(21.560.509)	48.560.434	4,81%	4.885.650	-	4.885.650
3.	PT Cemani Toka	Audited 2011	275.373.409	87.992.609	-	363.336.018	223.513.229	144.259.093	367.772.322	-	112.968.859	(2.869.839)	14.479.580	(129.014.904)	(4.436.304)	27,42%	27.059.300	-	27.059.300
4.	PT Determinan Indah																		

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Hak Minoritas	Modal Disetor	Tambahannya Modal Disetor	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah		
																	Cost Method	Equity Method	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (16 X 17)	20 (18 + 19)
	Sub Total 9		1.099.226.480	218.759.992	-	1.317.986.472	515.163.634	185.743.281	700.926.915	18.321.002	202.485.997	16.345.817	13.896.566	366.010.175	598.738.555		31.945.010	145.588.287	177.531.297
10	Bidang Rumah Sakit																		
1.	PT RS Haji Jakarta	Unaudited 2011	40.908.790	82.960.981	3.078.587	126.946.359	11.687.338	13.764.311	25.451.647	-	100.308.278	-	-	1.186.434	101.494.712	51,00%	51.157.222		51.157.222
	Sub Total 10		40.908.790	82.960.981	3.078.587	126.946.359	11.687.338	13.764.311	25.451.647	-	100.308.278	-	-	1.186.434	101.494.712		51.157.222	51.157.222	51.157.222
	Total Seluruh Bidang Industri		23.516.645.023	8.223.813.017	289.965.492	32.030.423.532	20.098.980.214	5.636.261.481	25.735.241.695	57.808.406	4.015.749.274	1.248.583.854	380.246.374	1.725.182.068	7.389.761.571	-	348.146.827	4.892.168.495	5.187.158.100

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Status	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3		4	5	6	4	5	6	7
	Sub Total 7			364.834.497	(196.227.174)	168.607.322	15.439.229	(65.947.380)	(28.401.040)	89.698.131
8	Bidang Angkutan Darat									
1.	PT Ratax Armada	Audited 2011		4.043.374	(1.525.988)	2.517.386	2.348.004	(9.379.967)	-	(4.514.578)
2.	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	Audited 2011		-	(24.145.607)	(24.145.607)	4.988.552	(119.048)	258.425	(19.017.678)
	Sub Total 8			4.043.374	(25.671.595)	(21.628.221)	7.336.556	(9.499.015)	258.425	(23.532.256)
9	Bidang Aneka Industri									
1.	PT Delta Djakarta, Tbk	Audited 2011		564.051.178	(171.149.868)	392.901.310	12.666.240	(200.696.380)	(53.156.128)	151.715.042
2.	PT Alakasa Industrindo, Tbk.	Audited 2011		873.024.320	(854.391.701)	18.632.619	3.785.990	(9.830.730)	(2.462.728)	10.125.151
3.	PT Cemari Toka	Audited 2011		456.202.052	(418.913.644)	37.288.408	5.141.479	(22.590.549)	(5.306.554)	14.532.785
4.	PT Determinan Indah									
	Sub Total 9			1.893.277.550	(1.444.455.213)	448.822.337	21.593.709	(233.117.659)	(60.925.410)	176.372.978
10	Bidang Rumah Sakit									
1.	PT RS Haji Jakarta	Unaudited 2011		143.767.578	(147.538.308)	(3.770.729)	1.961.196	(398.572)	(575.292)	(2.783.397)
	Sub Total 10			143.767.578	(147.538.308)	(3.770.729)	1.961.196	(398.572)	(575.292)	(2.783.397)
	Total Seluruh Bidang Industri			8.337.519.277	(6.432.539.925)	1.857.621.352	290.002.657	(703.069.887)	(314.824.522)	1.129.729.601

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011.

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO